

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DI DESA ULUBALANG KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE

Agussalim(1465140008)

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: Agussalimajhae@gmail.com

Abstrak

Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh bapak Dr. H. Muhammad Guntur,M.Si dan Prof. Dr. H. Fakhri Kahar,M.SI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang di peroleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko sudah berjalan secara efektif. Hal tersebut dilihat dari teori implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn yang digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan tentang implementasi alokasi dana desa yang ditinjau dari standar dan sasaran kebijakan, Sumber Daya, hubungan antar organisasi karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, dan disposisi implementor.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan. Alokasi Dana Desa.*

1. PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas usul, dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.²

Dasar hukum Alokasi Dana Desa yaitu Undang-undang 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 81 Dan 82), Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa Di Kabupaten Bone, selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Tata Cara Pembagian Dana Tranfer di Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1

² Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 1 Ayat 5.

Bone Nomor 14 tahun 2015 Tentang Besaran Dana Transfer pada setiap desa di Kabupaten Bone, dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 13 tahun 2017 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Transfer Dana Ke Desa tahun anggaran 2017 sedangkan mengenai Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Desa diatur dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/Sj perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya.

Berdasarkan data hasil dilapangan bahwa alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone setiap tahunnya mengalami perubahan. Adapun jumlah alokasi dana desa setiap tahunnya yaitu: tahun 2014 sebanyak Rp. 46.281.840, tahun 2015 sebanyak Rp. 361.800.000, tahun 2016 sebanyak Rp. 343.545.000, tahun 2017 sebanyak Rp. 376.454.000 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp. 370.160.600.

Alokasi dana desa di desa ulubalang lebih banyak diperuntukkan membiayai bidang pemerintahan desa yang meliputi penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, pembinaan PKK, pembinaan kemandirian dan ketentraman, serta gaji insentif para pemerintah desa ulubalang.³

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Pasal 37 bahwa Pencairan dana yang bersumber dari alokasi dana desa dilakukan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan.⁴

Pembagian penggunaan anggaran alokasi dana desa di desa ulubalang digunakan sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan sebelumnya, baik untuk membiayai operasional pemerintahan maupun biaya pembinaan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penggunaan alokasi dana desa harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan transparan dan akuntabel. Alokasi dana desa di desa ulubalang lebih fokus kepada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat desa.

Peraturan Bupati Bone Nomor 13 tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transfer Dana Ke Desa tahun anggaran 2017. Pada pasal 7 ayat 1 mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan 12 kali dalam satu tahun.
- b. Alokasi dana desa ditransfer pada minggu pertama setiap bulan.
- c. Penyaluran alokasi dana desa yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai permohonan pencairan dana.

Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa tahun anggaran 2017. Pada ayat 2 bahwa Bendahara Umum Daerah (BUD), mulai melakukan transfer ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima dokumen sebagai berikut:

- a. APBDes yang telah dievaluasi oleh camat.
- b. Print Out Rekening Kas Desa (Rekening Giro) dari Bank.
- c. Surat Permohonan Pencairan Dana.

³ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Tahun Anggaran 2017.

⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 37.

- d. Rekomendasi pencairan dari camat.
- e. Kwitansi Bermaterai 6.000.
- f. Surat Kuasa Pemindahbukuan.
- g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, dan
- h. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Pencairan dana pada bulan berikutnya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2017 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Transfer Dana Ke Desa tahun anggaran 2017. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa:

- a. Laporan pertanggungjawaban dana ADD bulan lalu mencapai 90%.
- b. Surat Permohonan Pencairan Dana.
- c. Rekomendasi pencairan dari camat.
- d. Kwitansi Bermaterai 6.000.
- e. Surat Kuasa Pemindahbukuan.
- f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, dan
- g. Surat Pengantar Pencairan dana dari Kepala Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.⁵

Penyelenggaraan pemerintahan desa ulubalang harusnya lebih meningkat karena sudah di dukung oleh dana yang berasal dari pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat maupun dana dari desa. Berdasarkan hasil prapeneltian peneliti melihat masih banyak pegawai kantor desa yang tidak masuk kantor di hari kerja. Hal-hal seperti ini menjadi penghambat untuk meciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa sehingga dapat mempengaruhi Pembangunan desa tidak meningkat yang dikarenakan pemerintah desa tidak

melakukan kerja yang maksimal untuk membangun desa ulubalang.

Karaktersitik yang berbeda tentu dapat mempengaruhi implementasi alokasi dana desa. Sejalan dengan hal tersebut sistem pengelolaan keuangan desa saat ini mampu memberikan keuangan manajemen yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang meliputi biaya oprasional perkantoran dan gaji pegawai dibutuhkan sumber daya manusia, komunikasi, dan komitmen dari para pelaksana kebijakan alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone dapat mempengaruhi kebijakan yang akan di implementasikan.

Berdasarkan dari uraian latarbelakang bahwa uraian tersebut merupakan bahan untuk di jadikan penelitian dengan judul **“Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”**. permasalahan yang akan dipecahka adalah bagaimanakah implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone. adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone.

2. TINJAUAN PUSTAKA

- a. Pengertian Kebijakan Publik

Feramana (2009), Titik awal yang bagus untuk menjelaskan kata kebijakan publik adalah dari bangsa yunani dan romawi. Dari bangsa romawi kita mengambil konsep publik dan privat. Bangsa romawi mendefinisikan kedua istilah tersebut dalam term *res publica* dan *res priva*. Gagasan publik dan privat

⁵ Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Transfer Dana Ke Desa Tahun Anggaran 2017 Pasal 7.

pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah *konion* (yang dapat diartikan publik) dan *idion* (yang bisa diartikan privat).⁶

Robert Eyestone dalam Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai ” Hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya”, sedangkan menurut, Heinz dan Kenneth Prewitt dalam Agustino (2008) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah “Keputusan tetap yang dicarikan dengan konsistensi dan pengulangan (Repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.⁷

b. Jenis Kebijakan Publik

James E. Anderson dalam Subarsono (2016) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut : Kebijakan Substantif vs Kebijakan Prosedural, Kebijakan Distributif vs Kebijakan Regulatori vs Kebijakan Redistributif, Kebijakan Material vs Kebijakan Simbolis dan Kebijakan yang berhubungan dengan Barang Umum (*Publik Goods*) dan Barang Privat (*Privat Goods*)⁸

c. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Anggara Sahaya (2014), Konsep Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *To Implement. To Implement* (Mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).⁹

Mazmania dan Sabatier dalam Wahab (2004), menyatakan bahwa,

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau di rumuskan yang merupakan proses fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.¹⁰

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Anggara Sahaya (2014) bahwa, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan yang yang digariskan dalam keputusan kebijakan.¹¹

d. Hakikat Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmania dan Sabetir dalam Anggara Sahaya (2014) bahwa, Hakikat utama dalam implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau di rumuskan¹².

e. Model-Model Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2016), ada lima

⁶ Surya fermana. 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofif*. Jogjakarta: Ar-Rus Media. hal. 31.

⁷ Leo, Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. hal 6.

⁸ Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal: 19-21.

⁹ Anggara, Sahaya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. hal. 232.

¹⁰ Wahab, solichin Abdul 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta:Bumi Aksara.

¹¹ Anggara, Sahaya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. hal. 232.

¹² Ibid. p. 232

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumber Daya, dalam Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*).
3. Hubungan Antar Organisasi, Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik Agen Pelaksana, Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola perhubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang mendapat lingkungan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan bagi dukungan implementasi kebijakan, karakteristik dan partisipan, yakni dukungan atau menolak.

6. Disposisi Implementor

Disposisi Implementor ini mencakup tiga hal penting yaitu: Respon Implementor terhadap Kebijakan, yang mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, Kognisi, dan Integritas disposisi implementor¹³.

f. Alokasi Dana Desa

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen).¹⁴

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.¹⁵

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk pembelanjaan dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa dibiaya dari ADD adalah sebagai berikut:

- a. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan

¹³ ibid. p. 99-101

¹⁴ Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintah desa*. Jakarta: penerbit ailangga. hal 88-89

¹⁵ Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksana Dana Desa*. Jakarta: Visi Media, hal. 42.

penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang termuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

- b. Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang di hadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir pengguna ADD.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati cq. Tim fasilitasi tingkat Kabupaten/Kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana alokasi dana desa (ADD).¹⁶

Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening desa pada bank yang di tunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pemdamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda kabupaten/kota meneruskan berkas permohonan berikut kepada badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau

kepala bagian pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD dan kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau di sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten kota.¹⁷

g. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan model Implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2016), karena teori ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur, menggambarkan dan menerangkan implemmentasi Alokasi Dana Desa Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Ada enam variabel dalam Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Teori ini yang dapat digunakan untuk menceritakan fenomena implemmtasi kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakana dalam peneilian ini yaitu kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif. Menurut Denzim dan Lincoln dalam Satori dan Komariah (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menanfsirkan fenomena yang terjadi dan di lakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁸

¹⁶ Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintah desa*. Jakarta: penerbit ailangga.hal 90.

¹⁷ Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit: Erlangga.hal 89

¹⁸ Satori & Komariah. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. Alfabeta: hal 23-24.

Penelitian ini dilakukan di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Indonesia. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data di uji melalui triangulasi dan *member check*. Kemudian analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang di dapatkan di lapangan serta di sesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, Pada penelitian peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2016), yang mengemukakan ada enam faktor implementasi kebijakan diantaranya: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. Untuk lebih jelasnya akan di bahas secara terperinci sebagai berikut:

a. Standar dan Sasaran kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2016) yang mengatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmania dan Paul Sabetir dalam Subarsono (2016) yang mengemukakan bahwa karakteristik meliputi kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa

besar adanya kerpautan dan dukungan antar berbagai instansi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan serta seberapa luas kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh pemahaman para agen pelaksana kebijakan terkait dengan standar dan sasaran kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak memiliki standar dan sasaran kebijakan maka kebijakan itu sangat sulit untuk diimplementasikan. Kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik apa bila para pelaksana kebijakan dapat memahami standar dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil di lapangan bahwa standar dan sasaran kebijakan alokasi dana desa di desa ulubalang yaitu untuk membiaya operasional pemerintahan seperti gaji perangkat desa, gaji kepala desa, dan badan permusyawaratan desa dan semua yang terlibat dalam pemerintahan desa dan semuanya itu sudah di tentukan sebelumnya. Selain dari pada itu tujuan alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pembangunan dan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone yang dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, dapat di simpulkan bahwa para agen pelaksana kebijakan telah memahami standar dan sasaran kebijakan dengan baik. Hal ini telah dilaksanakan dalam menjalankan kebijakan alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone sesuai dengan standar dan sasaran yaitu untuk

membiayai operasional perkantoran dan untuk penghasilan para perangkat desa.

b. Sumber daya

Van meter dan Van Horn dalam Subarsono (2016) mengemukakan sumber daya, dalam Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Implementasi alokasi dana desa harus di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai, dan ahli di bidangnya agar alokasi dana desa di desa ulubalang dapat terimplementasi sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan.

Dari teori Van Meter dan Van Horn tersebut tentang sumber daya dalam implementasi kebijakan sejalan dengan yang di kemukakan oleh George C. Edward III dalam Subarsono (2016) yang menjelaskan bahwa sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor.

Pandangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan ahli di bidangnya agar implemementasi kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

Alokasi dana desa merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah kabupaten kota yang di laksanakan oleh desa untuk menunjang kinerja para perangkat desa dengan adanya alokasi dana desa harapnya pemerintah desa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alokasi dana desa ini membutuhkan sumber daya yang memadai untuk mengelola kebijakan ini, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai maka kebijakan tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang menjelaskan bahwa kebijakan alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone sudah memiliki kualifikasi pendidikan yang baik dan terukur, yang sudah sesuai dengan bidangnya yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan dapat bekerja sama dengan baik. Alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone di pertanggungjawabkan oleh bendahara desa yang dinaungi oleh kepala urusan keuangan desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone.

Bendahara desa merupakan sumber daya manusia yang berfokus dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan alokasi dana desa di desa ulubalang yang di mulai dari proses pencairan alokasi dana desa sampai pada laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone.

c. Hubungan antar organisasi

Dalam menjalankan kebijakan, Implementasi sebuah kebijakan perlu dukungan kordinasi atau komunikasi untuk menjalankan kebijakan. Untuk itu diperlukan komunikasikan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus di lakukan maka perlu melakukan komunikasi. Sesuai yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi sebuah program perlu dukungan dan kordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan kordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III bahwa komunikasi yaitu, keberhasilan implementasi

kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga mengurangi distorsi implementasi.

Komunikasi yang terjalin dengan baik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan alokasi dana desa di desa ulubalang dikomunikasikan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat desa itu sendiri, dan model lain dalam komunikasi yang di bangun oleh para agen pelaksana alokasi dana desa ulubalang yaitu komunikasinya hanya pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil di lapangan komunikasi dalam alokasi dana desa dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi operasional perkantoran dan gaji aparatur desa. Seperti penghasilan tetap kepala desa dan perangkat, tunjangan dan oprasional Badan permusyawaratan desa, insentif RT dan RW, Iuran BPJS ketenagakerjaan, Iuran BPJS kesehatan, insentif staf kantor desa, insentif imam desa, insentif imam masjid, insentif guru mengaji, insentif Linmas, penyelenggaraan musrenbang desa, penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, pembebasan lahan Untuk gedung PAUD Patimpa Deceng, dan belanja barang dan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang di peroleh di lapangan komunikasi yang dibangun atau yang dilakukan untuk implementasi alokasi dana desa sudah cukup baik dan model komunikasi dengan musyawarah dan komunikasi hanya untuk gaji perangkat desa.

d. Karakteristik agen pelaksana

Organisasi perlu adanya peta untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan secara umum dan status dari berbagai

bagian agar mengetahui tugas dan kewenangannya. Garis-garis dari berbagai bingkai untuk menunjukkan interaksi yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh tiap bagian dari agen pelaksana kebijakan. Karakteristik agen pelaksana dapat mempengaruhi terhadap komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2016) Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola perhubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Agen pelaksana kebijakan alokasi dana desa harus memiliki karakteristik yang komitmen kuat agar kebijakan alokasi dana desa dapat di implementasikan sesuai dengan aturan yang berlaku serta sesuai dengan standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur merupakan acuan dari agen pelaksana untuk menjalankan kebijakan

Sesuai dengan tupoksi yang ada dalam pemerintahan di desa ulubalang kepala urusan keuangan, dan bendahara desa merupakan bagian yang sangat penting dalam implementasi alokasi dana desa. Bendahara desa yang merupakan bagian dari kepala urusan keuangan adalah satu kesatuan yang harus saling bekerja sama untuk sama-sama membangun komitmen untuk mensukseskan kebijakan alokasi dana desa. Kebijakan alokasi dana desa di desa ulubalang yang hanya di alokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi biaya oprasional perkantoran dan gaji perangkat desa. Hasil di lapangan membuktikan bahwa alokasi dana desa di desa ulubalang

sudah berdasarkan kepada keputusan yang ada.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Implementasi kebijakan kadang di pengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik, sehingga mengurangi nilai dalam kebijakan yang di implementasikan oleh implementor itu sendiri di dalam suatu daerah tertentu. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining dalam Subarsono (2016) bahwa Lingkungan tempat kebijakan itu dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lingkungan ini mencakup Lingkungan Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, dan Fisik atau Geografis.

Alokasi dana desa yang bertujuan hanya untuk biaya operasional perkantoran dan gaji perangkat desa, tidak ada pengaruh atau hubungannya dalam pelaksanaan alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone. hal ini sesuai dengan deskripsi fokus bahwa kondisis sosial ekomoni dan politik yaitu variabel ini mencakup sumber daya ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implemmentasi kebijakan dilihat dari sejauhmana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implemmentasi kebijakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa kebijakan alokasi dana desa di desa ulubalang tidak memiliki pengaruh dalam pelaksanaannya, karena hanya berdasarkan pada gaji perangkat desa dan biaya operasional perkantoran yang sudah ditentukan sebelumnya. Agen pelaksana kebijakan tetap harus mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan yang ada.

f. Disposisi implementor

Salah satu aspek penting dalam birokrasi adalah pemahaman adanya standar operasional prosedur yang menjadi pedoman bagi setiap

implementor dalam bertindak. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam subarsono (2016) bahwa disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahaman terhadap kebijakan, serta ingetritas disposisi implementor yaitu presensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Pada penelitian ini hanya menggunakan dua dari ketiga cakupan disposisi implememntor tersebut.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi pemerintah desa yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang dirasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Penilaian mengenai disposisi implementor terdapat dua hal penting yang perlu di perhatikan karena memiliki pengaruh terhadap kinerja pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, yakitu respon (dukungan/persetujuan) serta kognisi (pemahaman) dari agen pelaksana.

Respon dari agen pelaksana kebijakan alokasi dana desa memiliki pengaruh yang sangat penting dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa, respon dari pelaksana kebijakan dalam menanggapi atau menghadapi kebijakan alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone. Hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2016) bahwa

hal yang sangat penting dalam proses suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan, maka hendak dijelaskan pada point ini adalah sejauh mana respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pemerintah desa ulubalang dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa sangat berpengaruh untuk keberhasilan kebijakan walaupun kebijakan alokasi dana desa itu merupakan bukan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa ulubalang tetapi kebijakan yang di tetapkan oleh kabupaten kota untuk di implementasikan di desa. Dengan adanya respon yang baik dari pemerintah desa untuk mendukung kebijakan yang di limpahkan dari kabupaten kota ke desa maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan kerja sama para perangkat desa. Berdasarkan data di lapangan bahwa respon dari pemerintah desa ulubalang sudah cukup baik, dan karena adanya alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko pemerintah selalu aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemahaman terkait dengan standar dan sasaran serta mekanisme yang ada juga sangat di perlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Alokasi dana desa akan lebih mudah di implementasikan ketika sudah di pahami dengan baik oleh agen pelaksana kebijakan. terkait dengan alurnya maupun maupun mekanisme Alokasi dana desa di desa ulubalang sudah sesuai dengan alur atau mekanisme yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan data di lapangan bahwa alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone ditetapkan di APBDesa setelah adanya plafon dari bupati melalui musyawarah desa. Setelah selesai penetapan dan di tandatangani oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa, lalu kepala desa bermohon ke bupati untuk permohonan pencairan

alokasi dana desa ulubalang melalui kecamatan.

Berdasarkan data di lapangan bahwa Verifikasi permohonan pencairan alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone yaitu “Surat permohonan pencairan, Peraturan desa tentang RPJMdesa, Peraturan desa tentang RKPdesa tahun berjalan, Peraturan desa tentang APBDesa tahun berjalan, Rencana penggunaan dana, Kwitansi bermaterai 6000, Surat kuasa pemindah bukuan bermateria 6000, Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6000, Foto copy kas pemerintah desa, Surat pertanggungjawaban SPJ tahap/bulan sebelumnya, SK bendahara desa, Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun yang lalu. Lalu di verifikasi di tim verifikasi kecamatan.

5. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone, adapun yang kemudian menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: Implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang mengemukakan enam variabel dalam mempengaruhi kinerja implementasi yakni standar dan sasaran kebijakan telah di pahami oleh implementor kebijakan alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone. sumber daya manusia sudah cukup baik.

Hubungan antar organisasi dalam hal ini komunikasi dalam organisasi sudah cukup baik, Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini komitmen yang di miliki oleh para pelaksana implementor kebijakan alokasi dana desa

di desa ulubalang kecamatan salomekko sudah baik, kemudian tidak ada hubungan antara alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dan Disposisi implementor dalam sudah baik dalam implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone yang tinjau dari respon dan pemahaman yang di miliki oleh para implementor alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko sudah berjalan secara efektif.

b. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone. hal ini merupakan bukti ilmiah bahwa dalam implementasi alokasi dana desa di desa ulubalang kecamatan salomekko yang berjalan secara efektif.

c. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu:

1. Menjalankan kebijakan alokasi dana desa sesuai dengan standar dan sasaran yang telah ditetapkan dengan melibatkan sumber daya manusia sudah cukup baik
2. Mempertahankan komunikasi yang sudah berjalan cukup baik dan Pertahankan komitmen yang telah di bangun oleh pemerintah desa ulubalang.
3. Menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan tanpa menghubungkan antara kepentingan pribadi, kelompok dalam menjalankan kebijakan alokasi dana desa.

6. REFERENSI

a. Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bangung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fermana, Surya .2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofi*. Jogjakarta: Ar-Rus Media.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nurcholis. Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Sahaya, Anggara2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Satori & Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D Cetakan Ke-25*. Bandung: Alfabeta: Bandung. Hal. 225.
- Suharto, Didik G. 2016. *Mebangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksana Dana Desa*. Jakarta: Visi Media.
- Wahab, Solichin Abdullah. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

b. Jurnal

- Faradillah Paratama. 2013. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*. hal. 93.

Rasmah Hasman. 2015. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2107 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Trasnfer Dana Ke Desa Tahun Anggaran 2017.